2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telp. : (0274) 589583; Fax : (0274) 586712

Surel : bappeda@jogjaprov.go.id

Laman : bappeda.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Bappeda DIY Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Bappeda DIY. Tahun 2022 Bappeda DIY mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2023

Kepala BAPPEDA DIY,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAPPEDA

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.

NIP. 196905121986021002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Capaian sasaran strategis ”Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”:

- Diukur dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah (Indikator sasaran SKPD tahun N yang tercapai /Indikator sasaran RPJMD x100%).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 85,5%, sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 86,42%. Dengan demikian kinerja Bappeda telah melebihi target yang ditetapkan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 101,08%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 94,12% terjadi peningkatan sebesar 6,96%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY ke depan, sebagai berikut:

1) Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
2) Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
3) peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.
4) Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari e-*planning*, e-*budgeting, e-monev*, dan dataku

sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;

5) Peningkatan peran Bappeda DIY sebagai katalisator pembangunan daerah;
6) Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional.

Daftar Isi

Kata Pengantar 2
Ikhtisar Eksekutif 3
Daftar Isi 5
Daftar Tabel 6
Daftar Gambar 7
BAB I Pendahuluan 8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 9
1.3 Isu-Isu Strategis 13
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 13
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 18
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 18
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 19
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 28
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 31
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja 39
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 39
3.2 Efisiensi Anggaran 44
3.3 Inovasi 45
BAB 4 Penutup 52
LAMPIRAN 54

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 14
Tabel 1. 2 Sarana-Prasarana 15
Tabel 1. 3 Anggaran Tahun 2022 16
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Bappeda DIY, 2017-2022 19
Tabel 2. 2 Strategi dan Arah Kebijakan 19
Tabel 2.3. 1 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 21
Tabel 2.3. 2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 26
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bappeda DIY Tahun 2022 28
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bappeda DIY Tahun 2022 30
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 39
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2022 39
Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 40
Tabel 3. 4 Pengukuran Capaian Sasaran 41
Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 43
Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022 44
Tabel 3. 7 Inventarisasi Lintas Sektor Bappeda DIY 48

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 *Cascading Kinerja* 9
Gambar 1. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Bappeda DIY 10
Gambar 1. 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Bappeda DIY 12
Gambar 2. 1 Sistem Aplikasi Perencanaan 32
Gambar 2. 2 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP 33
Gambar 2. 3 Aplikasi Dataku 33
Gambar 2. 4 Aplikasi Geoportal 34
Gambar 2. 5 Aplikasi Simnangkis 35
Gambar 2. 6 Aplikasi Sistem Informasi Internal 36
Gambar 2. 7 Aplikasi Sistem Informasi Hasil Kelitbangan 36
Gambar 2. 8 Website Bappeda DIY 37
Gambar 2. 9 Instagram Bappeda 38

BAB 1
Pendahuluan

Bab I berisi:
1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun ~~2020~~ 2021*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

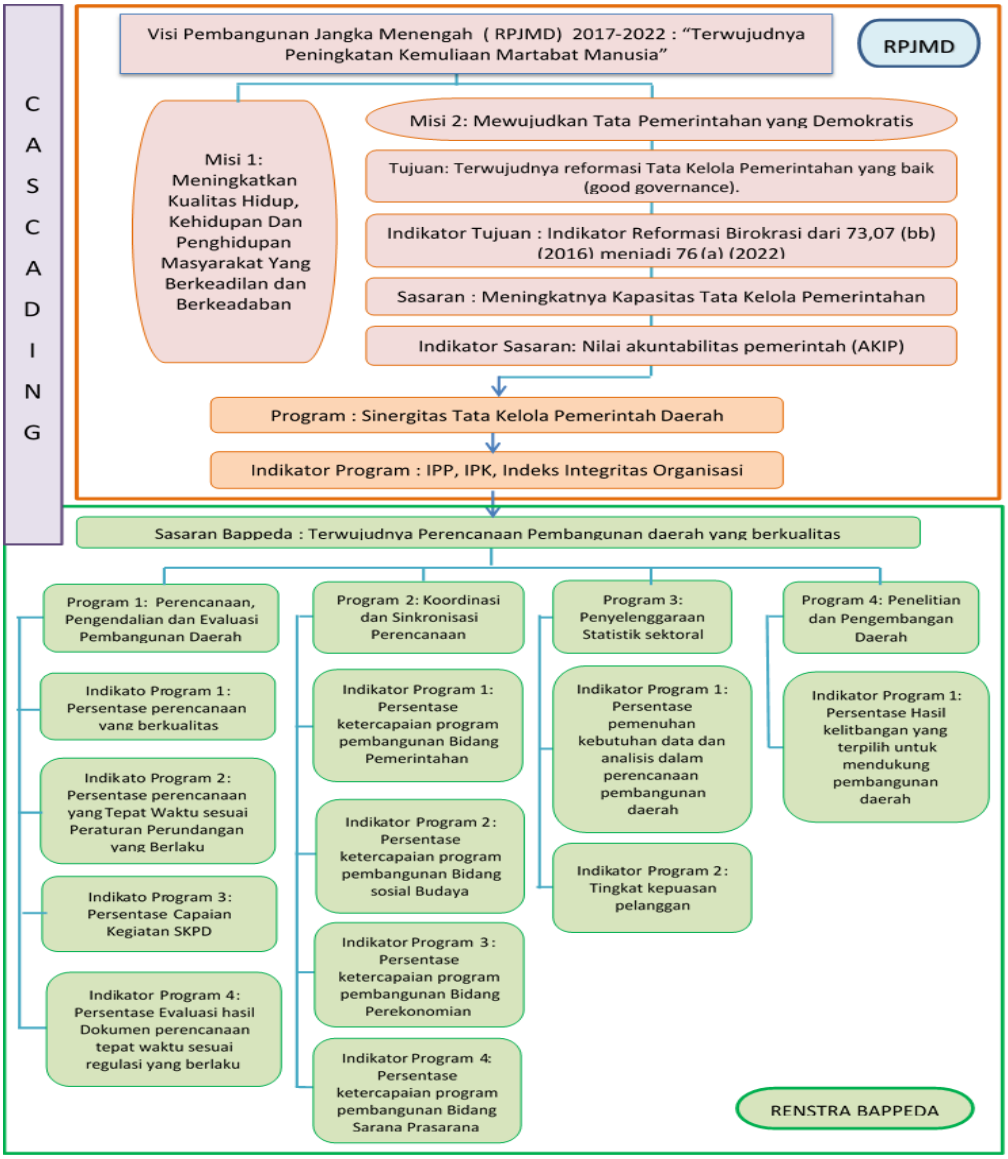

Sumber: Renstra Bappeda DIY 2017-2022

Gambar 1. 1 *Cascading Kinerja*

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

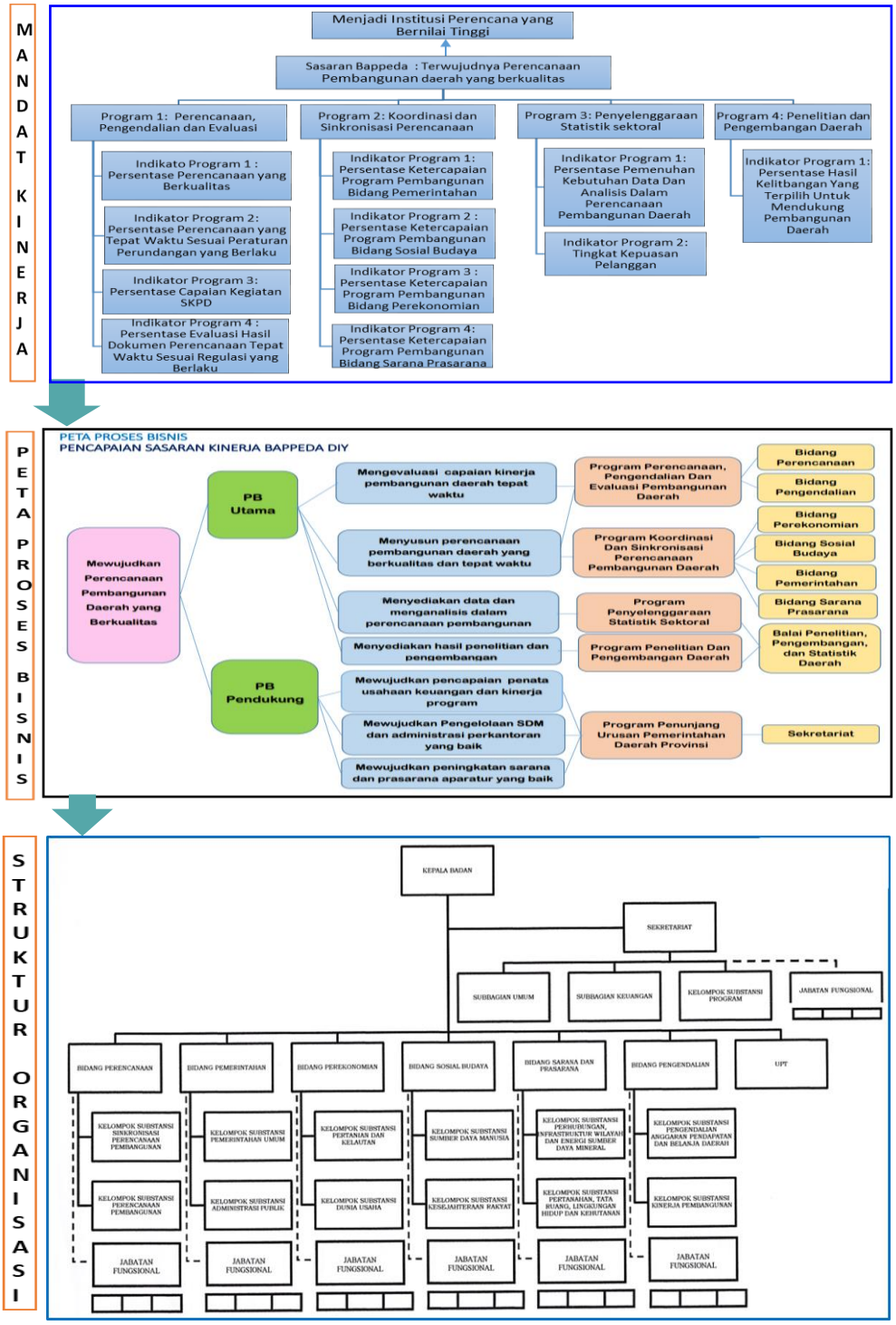

Sumber: Perdais DIY No. 1 Th. 2018 dan Pergub DIY No. 95 Th. 2021, SK Kepala Bappeda No.050/011145

Gambar 1. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Bappeda DIY

Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Bappeda DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik;
3. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan statistik;
5. penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di DIY;
6. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian;
7. penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
8. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
9. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan
10. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
11. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta statistik
12. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
13. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi, Bappeda DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana/fungsional umum berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai dengan komposisi, serta Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Gubernur DIY Nomor 130 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi Dan Penyetaraan Jabatan, sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Bappeda	
2. Sekretaris :	
1) Kepala Subbagian Umum	1) Dibawah Kasubbag Umum : a) Pengadministrasi Umum; b) Pengadministrasi Umum Persuratan; c) Pranata Kearsipan; d) Analis SDM Aparatur; e) Teknisi Sarana dan Prasarana; f) Kustodian Barang Milik Negara; g) Pengemudi
2) Kasubbag Keuangan	2) Dibawah Kasubbag Keuangan : a) Bendahara; b) Pengadministrasi Keuangan; c) Pengelola Gaji; d) Pengelola Akuntansi; e) Verifikator Data Laporan Keuangan;
3) Sub Koordinator Kelompok Substansi Program	3) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Program : a) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; b) Analis Sistem Informasi.
2. Kabid Perencanaan	
1) Sub Koordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan	1) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan : a) Pengadministrasi Umum; b) Analis Program Pembangunan
1) Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan	2) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan : a) Analis Perencanaan
3. Kabid Pemerintahan:	
1. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Umum	1) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Umum : a) Pengadministrasi Umum; b) Analis Perencanaan
2. Sub Koordinator Kelompok Substansi Administrasi Publik	2) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Administrasi Publik : a) Analis Perencanaan
4. Kabid Perekonomian	
1) Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan	1) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan : a) Pengadministrasi Umum; b) Analis Perencanaan
2) Sub Koordinator Kelompok Substansi Dunia Usaha	2) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Dunia Usaha : a) Analis Perencanaan
5. Kabid Sosial Budaya	
1) Sub Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia	1) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia : a) Pengadministrasi Umum; b) Analis Perencanaan
2) Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	2) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat : a) Analis Perencanaan
6. Kabid Sarana dan Prasarana	
1) Sub Koordinator Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral	1) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral : a) Pengadministrasi Umum; b) Analis Perencanaan
2) Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan : a) Analis Perencanaan
7. Kabid Pengendalian	
1) Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : a) Pengadministrasi Umum; b) Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
2) Sub Koordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan	2) Dibawah Sub Koordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan : a) Pengevaluasi Program dan Kinerja
8. Unit Pelaksana Teknis	Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD)
9. Jabatan fungsional.	1) Perencana 2) Peneliti 3) Arsiparis 4) Penatalaksana Barang

Gambar 1. 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Bappeda DIY

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Bappeda memperhatikan Isu strategis sebagai berikut:

1) Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
2) Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
3) peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.
4) Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari e-*planning*, e-*budgeting, e-monev*, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
5) Peningkatan peran Bappeda DIY sebagai katalisator pembangunan daerah;
6) Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D4/ D3	SMA		S2	S1	D4/ D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	V	V			1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi	98					62	13	30	6	13	29	33
	1. Administrator	8	V	V			8	6	2	0	0	4	4
	2. Pengawas	5		V			4	3	1	0	0	1	3
	3. Pelaksana	85		V	V		50	4	27	6	13	24	26
C.	Jabatan Fungsional	110	V	V	V		37	23	14	0	0	18	19
	Jumlah	**209**					**100**	**37**	**44**	**6**	**13**	**48**	**52**

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Desember 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Bappeda DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, dengan komposisi jenjang pendidikan S1 sebanyak 44 orang orang (44%) , jenjang pendidikan S2 sebanyak 37 orang (37%), D3 6 orang (6%), dan SLTA sebanyak 13 orang (13%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 109 orang, terdiri dari 73 orang pejabat fungsional dan 36 pejabat administrasi. Dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan, terdapat 13 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan pada jabatan pelaksana, namun dari sisi kompetensi yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dengan baik dan kompeten. Pejabat pelaksana Bappeda DIY masih kurang 35 orang dari formasi yang seharusnya. Pelaksanaan tugas fungsi agar dapat tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan, dibantu oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Non PNS (Tenaga Bantu) sesuai dengan kebutuhan/formasi yang belum terisi meskipun belum dapat terpenuhi semuanya.

Tabel 1. 2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
A.	**ASET TETAP**	**5.366**	**16.900.364.412,96**
1.	**Peralatan dan Mesin**	**2.145**	**11.790.641.872,96**
	a. Alat-alat besar	3 unit	446.104.300,00
	b. Alat-alat Angkutan	15 unit	2.656.701.600,00
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.536 unit	3.537.137.098,98
	d. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	231 unit	1.971.408.599,00
	e. Alat Kedokteran dan Kesehatan	4 unit	7.140.000,00
	f. Komputer	356 unit	3.172.150.274,98
2.	**Gedung dan Bangunan**	**4 unit**	**4.989.171.200,00**
	a. Bangunan Gedung	4 unit	4.989.171.200,00
3.	**Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**2 unit**	**36.567.500,00**
	a. Jaringan	2 unit	36.567.500,00
4.	**Aset Tetap Lainnya**	**3.215 unit**	**83.983.840,00**
	a. Buku Perpustakaan	3.214 buku	80.683.840,00
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1 unit	3.300.000,00
B.	**Aset Lainnya**	**204 unit**	**9.714.763.420,00**
1.	Aset Tidak Berwujud	100 unit	9.339.114.325,00
C.	**Aset Lain-Lain**	**104 unit**	**375.649.095,00**
	Aset Lain-Lain	104 unit	375.649.095,00
	Total	**5.570**	**26.615.127.832,96**

Sumber: Data Inventaris Aset Bappeda DIY 2022

**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022*

Kendaraan dinas yang dimiliki Bappeda DIY terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan dan 11 (sebelas) unit kendaraan operasional. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang arsip, ruang tunggu (lobi), ruang laktasi, perpustakaan, dan toilet umum serta akses bagi kaum disabilitas berupa toilet khusus, ram jalan untuk kursi roda dan tempat parkir khusus. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan peralatan mesin lainnya (PC, laptop, printer, peralatan TI lainnya) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Bappeda DIY. Namun demikian, guna mendukung keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja, Bappeda DIY terus melakukan upaya pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana, peralatan dan perlengkapan pendukung yang baru.

Tabel 1. 3 Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**			
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**-**	**-**
4	**1**	**02**	**Retribusi Daerah**	**-**	**-**	**-**
			Jumlah Pendapatan	**-**	**-**	**-**
5			**BELANJA DAERAH**			
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**-**		
5	1	01	Belanja Pegawai	17.527.474.308	17.352.547.582	- 174.926.726
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.683.926.690	10.217.157.890	533.231.200
5	1	05	Belanja Hibah			
5	**2**		**BELANJA MODAL**			
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.032.000	894.315.000	863.283.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
			Jumlah Belanja	27.242.432.998	28.464.020.472	1.221.587.474
			Total Surplus/(Defisit)	(28.464.020.472)	(28.464.020.472)	(1.221.587.474)
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	--		
			Jumlah Pengeluarah Pembiayaan	-		
			Pembiayaan Neto	**Rp-**		

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bappeda DIY Tahun 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 27.762.190.272,00 dan Dana Keistimewaan sebesar Rp 701.830.200,00. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 Anggaran Bappeda DIY semula Rp27.242.432.998,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 28.464.020.472,00 atau bertambah Rp 1.221.587.474,00. Perubahan anggaran Tahun 2022 merupakan salah satu upaya Bappeda DIY dalam peningkatan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Bappeda DIY. Selain anggaran dari APBD Bappeda juga mengelola APBN Dana Dekonsentrasi yaitu dari BAPPENAS melalui Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Rp 908.824.000,00 dan dari Kemendagri melalui Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Rp 194.516.000,00.

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1. 2.	Secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja OPD meliputi Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal sehingga capaian nilai akuntabilitas kinerja yang telah diperoleh dapat dipertahankan/ ditingkatkan ; Meningkatkan peran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilki dalam rangka menunjang pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Berupaya melaksanakan Rekomendasi hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP : 1. Secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja OPD meliputi Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal sehingga capaian nilai akuntabilitas kinerja yang telah diperoleh dapat dipertahankan/ ditingkatkan ; 2. Meningkatkan peran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilki dalam rangka menunjang pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Reformasi BIrokrasi (RB) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Namun demikian Bappeda DIY Tahun 2022 terdapat kenaikan anggaran dalam rangka melaksanakan amanat dari pemerintah pusat, yaitu penyusunan Ranwal RPJMD 2022-2027 dan rekomendasi DPRD DIY untuk menyusun Naskah Akademik Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005, serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda DIY, antara lain anggaran untuk kebutuhan sarana prasarana, peralatan dan mesin lainnya.

Renstra Bappeda DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan/sub kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Bappeda DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Bappeda DIY selama lima tahun adalah:

"Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi"

Adapun sasaran Bappeda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Bappeda DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	83,0	83,5	84,0	84,5	85,0	85,5	85,5

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. 2. Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan. 3. Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk membangun sinergi melalui forum Pentahelix. 4. Mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi sistem perencanaan pembangunan 5. Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sengguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda. 2. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan. 3. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		mutu perencanaan dan pengendalian Pembangunan 6. Meningkatkan peran forum Pentahelix untuk membangun sinergi dengan kabuapten/kota 7. Meningkatkan Teknologi Informasi untuk mengatasi perubahan kebijakan yang sering terjadi 8. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 9. Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi 10. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk memperkecil dampak perubahan kebijakan 11. Integrasi sistem perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi 12. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota	tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan. 4. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. 5. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan, 6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator. 7. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiyaan pembangunan. 8. Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal Bappeda DIY dan dengan sistem informasi di luar Bappeda DIY yang terkait. 9. Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan 10. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			konsisten dan terukur 11. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data 12. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, Jogja Dataku, Geoportal, dan Simnangkis) sesuai dengan kebutuhan. 13. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur.

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Bappeda DIY tahun 2022 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3. 1 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	**1.1.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**4.415.844.750**	**4.900.378.750**	**484.534.000**
	1.1.1.Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.562.376.250	3.046.910.250	484.534.000
	1.1.1.1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan	125.019.000	125.019.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			
	1.1.1.2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.437.357.250	2.921.891.250	484.534.000
	1.1.2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.853.468.500	1.853.468.500	0
	1.1.2.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	46.825.000	46.825.000	0
	1.1.2.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.748.488.500	1.748.488.500	0
	1.1.2.3. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	58.155.000	58.155.000	0
	1.2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**1.699.832.500**	**1.699.832.500**	**0**
	1.2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.257.354.500	1.257.354.500	0
	1.2.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	203.020.000	203.020.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	72.174.500	72.174.500	0
	2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	185.960.000	185.960.000	0
	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	796.200.000	796.200.000	0
	1.2.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	216.722.000	216.722.000	0
	1.2.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	139.538.000	139.538.000	0
	1.2.2.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	77.184.000	77.184.000	0
	1.2.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	225.756.000	225.756.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.2.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39.000.000	39.000.000	0
	1.2.3.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.976.000	19.976.000	0
	1.2.3.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	155.899.000	155.899.000	0
	1.2.3.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.881.000	10.881.000	0
	1.3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**389.387.350**	**389.387.350**	**0**
	1.3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	389.387.350	389.387.350	0
	1.3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	389.387.350	389.387.350	0
	1.4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	**258.281.000**	**217.181.000**	**(41.100.000)**

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.4.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	62.508.000	62.508.000	0
	1.4.2.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	31.254.000	31.254.000	0
	1.4.2.2 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	31.254.000	31.254.000	0
	1.4.2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	195.773.000	154.673.000	(41.100.000)
	1.4.3.1 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	195.773.000	154.673.000	(41.100.000)
	1.5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	816.506.000	701.830.200	(114.675.800)
	1.5.1.Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	816.506.000	701.830.200	(114.675.800)
	1.5.1.1.Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	816.506.000	701.830.200	(114.675.800)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		**7.579.851.600**	**7.908.609.800**	**328.758.200**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Bappeda Tahun 2022

Tabel 2.3. 2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**19.662.581.398**	**20.555.410.672**	**892.829.274**
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.763.500	76.763.500	0
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.721.000	22.721.000	0
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.043.500	25.043.500	0
	1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.999.000	28.999.000	0
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.545.134.308	17.370.207.582	(174.926.726)
	1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.455.954.308	17.281.027.582	(174.926.726)
	1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.840.000	52.840.000	0
	1.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.240.000	6.240.000	0
	1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.134.000	7.134.000	0
	1.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	22.966.000	22.966.000	0
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.300.000	15.300.000	0
	3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.300.000	15.300.000	0
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.714.000	95.714.000	0
	4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	95.714.000	95.714.000	0
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	974.915.150	1.046.381.250	71.466.100
	5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.317.000	14.317.000	0
	5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.223.500	70.223.500	0
	5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.768.000	50.768.000	0
	5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.785.250	53.785.250	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.920.000	10.920.000	0
	5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	689.098.000	760.564.100	71.466.100
	5.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	85.803.400	85.803.400	0
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.032.000	895.149.000	864.117.000
	6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	636.290.000	636.290.000
	6.2. Pengadaan Mebel	9.760.000	9.760.000	0
	6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.272.000	249.099.000	227.827.000
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.302.640	409.302.640	0
	7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.100.000	15.100.000	0
	7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.008.240	46.008.240	0
	7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.960.000	39.960.000	0
	7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	308.234.400	308.234.400	0
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.419.800	646.592.700	132.172.900
	8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.019.000	31.014.000	(5.000)
	8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.456.000	241.448.000	(8.000)
	8.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	10.148.000	10.148.000	0
	8.4. Pemeliharaan Mebel	14.595.000	14.595.000	0
	8.5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.590.000	74.589.900	21.999.900

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	8.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.890.800	235.076.800	110.186.000
	8.7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.721.000	39.721.000	0
	Total Anggaran Pendukung	**19.662.581.398**	**20.555.410.672**	**892.829.274**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Bappeda DIY Tahun 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	85,5	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	85,5*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pengembangan Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (APBD)	Rp 389.387.350,00
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (APBD)	Rp 4.415.844.750,00
3.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah		
4.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (APBD)	Rp 1.699.832.500,00
5.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya		
6.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana		

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
7.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan		
8.	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (APBD)	Rp 258.281.000,00
9.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 19.662.581.398,00
10.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp 26.425.926.998,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Sekretariat Daerah, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusana Tata Cara Pengisian jabatan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Subkegiatan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Rp 816.506.000,00.
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Rp 920.491.000,00.

Pada tahun 2022, Bappeda DIY melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja. Reviu dilakukan karena adanya penambahan anggaran untuk melaksanakan amanat dari pemerintah pusat, yaitu penyusunan Ranwal RPJMD 2022-2027 dan rekomendasi DPRD DIY untuk menyusun Naskah Akademik Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005, serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda DIY, antara lain anggaran untuk kebutuhan sarana prasarana, peralatan dan mesin lainnya yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bappeda DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	85,5	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	85,5*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pengembangan Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (APBD)	Rp 389.387.350,00
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (APBD)	Rp 4.900.378.750,00
3.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah		
4.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (APBD)	Rp 1.699.832.500,00
5.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya		
6.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana		
7.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan		
8.	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (APBD)	Rp 217.181.000,00
9.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 20.555.410.672,00
10.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp 27.762.190.272,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Sekretariat Daerah, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusana Tata Cara Pengisian jabatan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Subkegiatan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Rp 701.830.200,00.
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Rp 908.824.000,00 dan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Rp 194.516.000,00 .

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran bertambah 4,48% dalam rangka melaksanakan amanat dari pemerintah pusat, yaitu penyusunan Ranwal RPJMD 2022-2027 dan rekomendasi DPRD DIY untuk menyusun Naskah Akademik Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005, serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda DIY, antara lain anggaran untuk kebutuhan sarana prasarana, peralatan dan mesin lainnya.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi dari BAPPENAS melalui Program Perencanaan Pembangunen Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Rp 908.824.000,00 dan dari Kemendagri melalui Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Rp 194.516.000,00.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Jogja Plan (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)

   Jogjaplan merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat luas. Jogjaplan dapat diakses melalui www.jogjaplan.com. Tampilan Jogjaplan dapat dilihat pada gambar berikut :

Sumber : http://jogjaplan.jogjaprov.go.id/

Gambar 2. 1 Sistem Aplikasi Perencanaan

2. Sengguh (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah)

   Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

   Aplikasi Sengguh membantu pencapaian kinerja Bappeda dalam melaksanakan evaluasi pembangunan daerah. Fitur-fitur dalam Sengguh meliputi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), ESAKIP (E-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Logframe/KAK (Kerangka Acuan Kerja), ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan), EMONEV (E-Monitoring dan Evaluasi), PKKI (Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi), Program Strategis, ELKPJ (E-Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur), Lintas Sektor dan Monev APBN (Monitoring Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Sengguh dapat diakses melalui https://sengguh.jogjaprov.go.id/. Tampilan Sengguh dapat dilihat pada gambar berikut :

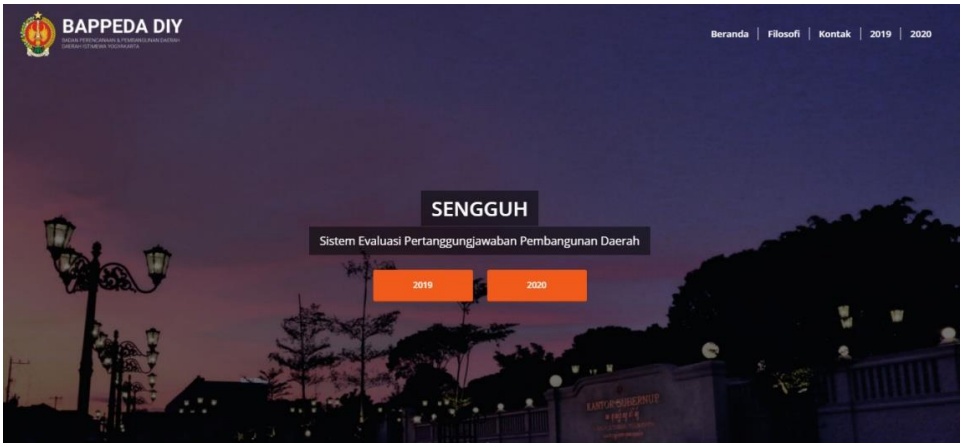

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

Gambar 2. 2 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

3. Dataku (Sistem aplikasi penyediaan data statistik)

Dataku merupakan aplikasi yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam menyediakan data statistik untuk keperluan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dataku dapat diakses melalui alamat http://www.bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/. Tampilan Dataku dapat dilihat pada gambar berikut :

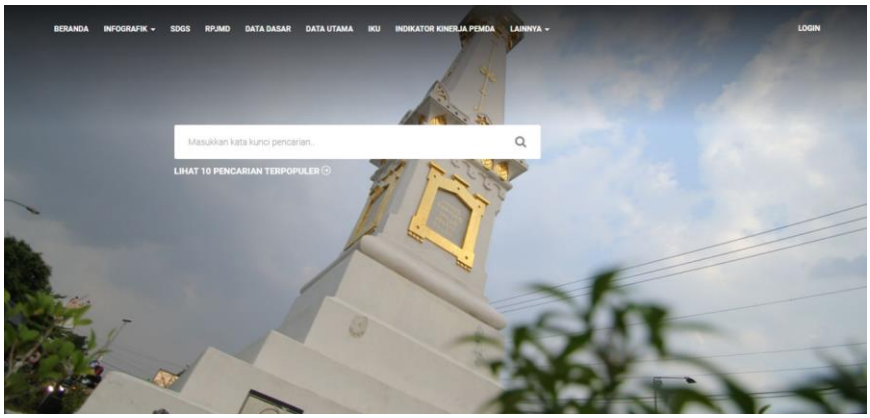

Sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/

Gambar 2. 3 Aplikasi Dataku

4. Geoportal (Sistem Informasi Data Spasial)

Geoportal merupakan aplikasi yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam penyediaan data berupa peta geospasial untuk keperluan perencanaan pembangunan. Penyediaan dan pengolahan data berupa peta masih cukup jarang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan. Data geospasial sama pentingnya dengan data statistik yang berupa angka, karena paradigma perencanaan pembangunan yang bersifat kewilayahan membutuhkan data berupa peta geospasial. Salah satu contoh data yang disediakan dalam aplikasi Geoportal adalah Persebaran Desa Wisata Kabupaten Bantul. Peta tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam membuat perencanaan untuk menentukan lokasi pembangunan desa wisata. Geoportal dapat diakses melalui http://geoportal.jogjaprov.go.id/. Tampilan geoportal dapat dilihat pada gambar berikut :

Sumber : http://geoportal.jogjaprov.go.id/

Gambar 2. 4 Aplikasi Geoportal

5. Simnangkis (Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan)

Simnangkis merupakan aplikasi yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam rangka penyediaan data penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Fitur utama dalam aplikasi meliputi database penanggulangan kemiskinan, monitoring dan evaluasi capaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di DIY, inventarisasi program kegiatan kemitraan Pemda DIY dengan dunia usaha. Aplikasi Simnangkis dapat diakses melalui http://simnangkis.jogjaprov.go.id/. Tampilan Simnangkis dapat dilihat pada gambar berikut :

Sumber : http://simnangkis.jogjaprov.go.id/

Gambar 2. 5 Aplikasi Simnangkis

6. Sistem Infomasi Internal (Sistem Informasi Pengendalian Internal)

Sistem Informasi Internal Bappeda DIY dibangun pada tahun 2016 dengan fungsi utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan internal Bappeda DIY. Sistem Informasi Internal telah mampu mendorong efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bappeda. Tampilan aplikasi Sistem Informasi Internal Bappeda dapat dilihat pada gambar berikut :

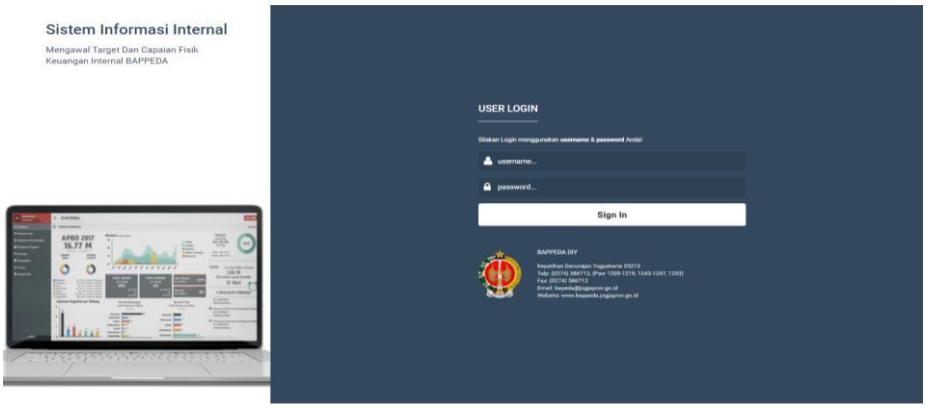

Sumber : http://bappeda.jogjaprov.go.id/si_internal/2022/

Gambar 2. 6 Aplikasi Sistem Informasi Internal

7. SI HK (Sistem Informasi Hasil Kelitbangan)

Sistem Informasi Hasil Kelitbangan adalah sistem informasi untuk inventarisasi dan menampilkan resume hasil-hasil penelitian di DIY. Aplikasi dapat diakses pada alamat https://root.jogjaprov.go.id/. Tampilan aplikasi adalah sebagai berikut :

Sumber : https://root.jogjaprov.go.id/

Gambar 2. 7 Aplikasi Sistem Informasi Hasil Kelitbangan

8. Website Bappeda

Selain berfungsi sebagai media keterbukaan informasi publik, website Bappeda juga berfungsi sebagai wahana menampung aspirasi/hasil karya/tulisan pejabat fungsional tertentu di Bappeda DIY. Pejabat fungsional perencana dapat mengunggah/mempublikasikan aspirasi/hasil karya/tulisan pada menu JFP corner dan pejabat fungsional peneliti pada menu Litbang corner.

Sumber : http://bappeda.jogjaprov.go.id/

Gambar 2. 8 Website Bappeda DIY

9. Instagram Bappeda

Untuk keperluan peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik, Bappeda DIY juga memanfaatkan *platform* Instagram pada akun @bappedadiy. Media sosial ini merupakan ajang komunikasi publik dan pelayanan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Bappeda serta informasi-informasi umum lainnya. Profil Instagram Bappeda DIY dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber : https://www.instagram.com/bappedadiy/

Gambar 2. 9 Instagram Bappeda

BAB 3
Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Bappeda DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda DIY dengan Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indikator: Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah Meta Indikator: Indikator sasaran PD Tahun N yang tercapai/indikator sasaran RPJMD x 100%	%	78	80	85,5	86,42	101,08	Sangat Baik	85,5

Analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Kinerja sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas diukur dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	Indikator sasaran PD Tahun N yang tercapai/indikator sasaran RPJMD x 100%

Sumber data diolah dari capaian sasaran perangkat daerah tahun 2022 berdasarkan data pada aplikasi Sengguh (https://sengguh.jogjaprov.go.id/). Ketercapaian sasaran Bappeda dihitung dari indikator sasaran perangkat daerah tahun N yang tercapai dibagi dengan indikator sasaran RPJMD dikali 100%. Total sasaran perangkat daerah adalah 81 indikator sasaran, indikator perangkat daerah yang tercapai sejumlah 70 indikator, sehingga penghitungan realisasi kinerja Bappeda adalah sebagai berikut :

70/81 x 100% = 86,42%

Rincian jumlah indikator sasaran yang tercapai dan tidak tercapai pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Pengukuran Capaian Sasaran

No	Perangkat Daerah	Jumlah Indikator Sasaran PD	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tercapai	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tidak tercapai	Persentase Indikator Sasaran PD yang tercapai (%)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2	2	0	100
2.	Badan Penghubung Daerah	1	1	0	100
3.	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protolkol	2	2	0	100
4.	Paniradya Kaistimewan	3	2	1	66,67
5.	Sekretariat DPRD	2	2	0	100
6.	Biro Tata Pemerintahan	2	2	0	100
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	0	1	0
8.	Biro Organisasi	2	2	0	100
9.	Inspektorat	1	1	0	100
10.	Biro Hukum	2	2	0	100
11.	Badan Kepegawaian Daerah	1	1	0	100
12.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1	1	0	100
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	0	100
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	0	100
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	0	100
16.	Dinas Koperasi dan UKM	3	3	0	100

No	Perangkat Daerah	Jumlah Indikator Sasaran PD	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tercapai	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tidak tercapai	Persentase Indikator Sasaran PD yang tercapai (%)
17.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	0	2	0
18.	Dinas Pariwisata	2	0	2	0
19.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	3	0	100
20.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	2	2	0	100
21.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3	2	1	66,67
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	2	0	100
23.	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	1	1	0	100
24.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olharga	5	4	1	80
25.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	2	0	100
26.	Biro Bina Mental	1	1	0	100
27.	Dinas Kesehatan	4	4	0	100
28.	Dinas Sosial	2	2	0	100
29.	DP3AP2	3	2	1	66,67
30.	Dinas Kebudayaan	4	4	0	100
31.	Biro Pemberdayaan Masyarakat	2	2	0	100
32.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan ESDM	8	7	1	87,5
33.	Dinas Perhubungan	1	1	0	100
34.	Biro PIWP2	1	1	0	100

No	Perangkat Daerah	Jumlah Indikator Sasaran PD	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tercapai	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tidak tercapai	Persentase Indikator Sasaran PD yang tercapai (%)
35.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	1	1	50
36.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4	4	0	100
37	Bappeda	1	1	0	100
	Capaian	81	70	11	86,42

Kinerja sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022) (%)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	80	85,5	86,42	101,08 (86,42/85,5 X100%)	85,5	101,08

Analisis Ketercapaian Sasaran: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 86,42%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101,08% (terlampaui).
b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 94,12%, terdapat peningkatan sebesar 6,96 %.
c. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian Tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022.

Faktor Pendukung keberhasilan :

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga disebabkan oleh dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan dan pengendalian, dukungan sarana prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi), ketepatan penetapan sasaran perencanaan pembangunan serta ketersediaan data pendukung dalam melaksanakan proses perencanaan.

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	85.5 %	86,42 %	101,08	7.908.609.800	7.297.827.366	92,28	7,72
Jumlah						**7.908.609.800**	**7.297.827.366**	**92,28**	**7,72**
Program penunjang						**20.555.410.672**	**19.646.071.934**	**95,58**	**4,42**
Total Belanja Langsung						**28.464.020.472**	**26.943.899.300**	**94,66**	**5,34**

Sumber: *https://sipd.kemendagri.go.id/siap/*, *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Th 2022, Laporan Keuangan Bappeda Th 2022*

Berdasarkan tabel III.5 di atas capaian kinerja sasaran Bappeda DIY melampaui target kinerja tahun 2022 dengan realisasi anggaran dari total belanja langsung program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.7.908.609.800,- terealisasi Rp.7.297.827.366,- atau 92,28% dan efisiensi sebesar 7,72% yang bersumber dari laporan keuangan Bappeda DIY Tahun 2022.

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi yang dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

a. Jogjaplan (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)

Pada tahun 2022 dilakukan updating pada aplikasi Jogjaplan sebagai berikut :

- ✓ Pengembangan fitur aplikasi dalam rangka mendukung integrasi dengan database mirror dari SIPD
- ✓ Penyediaan API (Application Programming Interface) dari aplikasi yang menyediakan data yang memungkinkan untuk integrasi dengan aplikasi lain
- ✓ Penyempurnaan modul RPJMD, Renstra dan RKPD yang mendukung kebutuhan perencanaan di daerah yang belum tersedia pada SIPD

b. Sengguh (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah)

Pada tahun 2022 dilakukan updating pada aplikasi Sengguh sebagai berikut :

- ✓ Pembuatan rancang bangun integrasi Sengguh dengan aplikasi keuangan daerah
- ✓ Perbaikan *business process* aplikasi

c. Simnangkis (Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan)

Pada tahun 2022 dilakukan updating pada aplikasi Simnangkis sebagai berikut :

- ✓ Updating data kemiskinan berdasar DTKS Kementerian Sosial terbaru
- ✓ Pengembangan menu analisis kemiskinan berbasis wilayah/kawasan
- ✓ Updating data capaian SDGs
- ✓ Updating data program kegiatan CSR

d. Dataku (Sistem Informasi Data Statistik Daerah)

Pada tahun 2022 dilakukan updating pada aplikasi Dataku sebagai berikut :

- ✓ Pengembangan modul dashboard pada akun admin DIY dan operator yang mendukung pembagian kewenangan DIY dan kabupaten/kota sampai level OPD
- ✓ Pengembangan modul monitoring yang mendukung pembagian kewenangan DIY dan kabupaten/kota sampai level OPD

- ✓ Pengembangan modul laporan yang mendukung pembagian kewenangan DIY dan kabupaten/kota sampai level OPD
- ✓ Penyempurnaan modul infografik
- ✓ Penambahan fitur notifikasi bagi admin, sehingga bisa diketahui dengan cepat ketika ada kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti di dalam aplikasi
- ✓ Pengembangan kapasitas interoperabilitas data dengan menyediakan button link akses Script API
- ✓ Pengembangan kapasitas untuk menerima dan menyediakan data dengan format yang sudah ditentukan untuk mendukung integrasi data dengan aplikasi lain menggunakan protocol API
- ✓ Pembangunan fitur untuk menampilkan data IKK dan SPM pada level pengguna tertentu
- ✓ Penambahan informasi data yang sudah terverifikasi dan belum terverifikasi
- ✓ Pembangunan fitur untuk mengelola Berita Acara
- ✓ Pengembangan fungsi aplikasi berdasarkan user experience

e. Sistem Informasi Internal (Sistem Informasi Pengendalian Internal)

Pada tahun 2022 dilakukan updating pada aplikasi Sistem Informasi Internal sebagai berikut :

- ✓ Penyesuaian struktur anggaran belanja dan struktur organisasi
- ✓ Penambahan menu progres pengadaan barang dan jasa sesuai dengan form progres barang dan jasa per triwulan, form bukti fisik pelaksanaan sub kegiatan per triwulan, progres akuntabilitas kinerja Bappeda DIY per triwulan, form Berita Acara desk monev bulanan, dan upload dokumen perencanaan
- ✓ Perbaikan menu pengendalian dan keuangan

f. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.

g. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Bappeda misalnya aplikasi SATRIYA, sisminkada, peladen, SIPD, sadewa, kinarya, SP4N Lapor, Simpeg, SI-Informan, e-prima, presensi2, SIERA, P3DN, SIRUP, SPSE, e-persediaan, dan si-rkbmd.

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yograkarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Bappeda DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimwea Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Bappeda DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak pandemi COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Inventarisasi Lintas Sektor Bappeda DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kementerian Dalam Negeri	fasilitisasi, koordinasi dan sinkronisisasi pelaksanaan Rakortek	Dokumen perencanaan	37 perangkat daerah	Manfaat bagi OPD : Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan Mendukung pencapaian kinerja sasaran Bappeda Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Manfaat bagi kelompok sasaran : Acuan pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan
		Bappenas	Penyelarasan RKP dengan RKPD			
		BPKA	Kebijakan penganggaran, tim SK Gub dan SK Sekda, ASB, SHBJ			
		DPRD	Pokok pikiran DPRD			
		Biro Hukum	Penetapan peraturan /keputusan Gubernur			
		Inspektorat	Reviu dokumen perencanaan			
		Perguruan tinggi	Memberikan masukan pada konsultasi publik			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		LSM	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
		Masyarakat	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
2.	Penyusunan Dokumen/Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kemenpan RB	Mengarahkan penyusunan LKj dan memberikan penilaian terhadap laporan Sakip	Dokumen/laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	37 perangkat daerah	Manfaat bagi OPD : Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan Mendukung pencapaian kinerja sasaran Bappeda Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Manfaat bagi kelompok sasaran : Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dapat menjadi masukan perencanaan tahun berikutnya
		DPRD	Kolaborasi pembentukan pansus dalam rangka pembahasan LKPJ hingga menghasilkan catatan rekomendasi LKPJ			
		BPKA	Pertanggungjawaban anggaran			
		Inspektorat	Melakukan reviu dokumen/laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Biro Hukum	Pembahasan peraturan/keputusan Gubernur			
3.	Penyusunan RAD TPB dan RAD PG	OPD terkait RAD PG DIY dan kabupaten/ kota	Menyediakan data terkait strategi, aksi, indikator, target dan menyusun data laporan monev	Dokumen RAD PG, dokumen RAD TPB, data kemiskinan	OPD DIY, kabupaten/ kota, masyarakat	Manfaat bagi OPD dan kelompok sasaran : Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan, dapat dimanfaatkan publik
		OPD terkait RAD TPB, akademisi, masyarakat, pengusaha	Melaksanakan kegiatan terkait SDG's			
		Sebermas	Melakukan koordinasi melibatkan lintas OPD dan kabupaten/kota serta dunia usaha dalam rangka koordinasi data kemiskinan, perumusan program penanggulangan kemiskinan dan intervensinya			
4.	Penyelenggaraan Satu Data	Wali data pendukung	Menyampaikan data dan metadata kepada	Data statistik, data geospasial	OPD DIY, kabupaten/	Manfaat bagi OPD dan kelompok sasaran :

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
	Pembangunan Daerah	dan produsen data	walidata, membantu walidata provinsi membina produsen data		kota	Hasil kolaborasi dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, dan dapat dimanfaatkan publik
		BPS	Pembina data statistik			
		BIG	Pembina data spasial			

BAB 4 Penutup

Penutup

Bab 4 Berisi :
1. Kesimpulan
2. Rekomendasi Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja Bappeda DIY tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022, realisasi kinerja Bappeda DIY melampaui target yang ditentukan, dengan capaian sebesar 101,08%. Dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat peningkatan sebesar 6,95% dibandingkan tahun 2021.
2. Faktor penghambat keberhasilan pencapaian sasaran Bappeda DIY Tahun 2022 adalah :
   a. Pandemi covid-19 di DIY masih berdampak pada kinerja perangkat daerah hingga tahun 2022, yang mengakibatkan beberapa sasaran perangkat daerah masih belum dapat tercapai.
   b. Perangkat daerah dengan sasaran yang tidak tercapai meliputi :
      - ✓ Dinas Komunikasi dan Informatika
      - ✓ Dinas Perindustrian dan Perdagangan
      - ✓ Dinas Pariwisata
      - ✓ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
      - ✓ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
      - ✓ DP3AP2
      - ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
      - ✓ Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
      - ✓ Paniradya Kaistimewan
3. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga disebabkan oleh dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan dan pengendalian, dukungan sarana prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi), ketepatan penetapan sasaran perencanaan pembangunan serta ketersediaan data pendukung dalam melaksanakan proses perencanaan.

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, serta pendampingan perangkat daerah secara berkelanjutan.

2. Untuk Periode selanjutnya merubah cara perhitungan indikator/meta indikator kinerja Bappeda DIY.
3. Melakukan inovasi secara berkelanjutan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	persen	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562563 Faksimile (0274) 586712
Website : http://www.bappeda.jogjaprov.go.id e-mail : bappeda@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka tindak lanjut penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	PEMBANGUNAN DAERAH DIY,
HAMENGKU BUWONO X	Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.
	NIP. 19650512 198602 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	85,5	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	85,5*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran	
1.	Program Pengembangan Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (APBD)	Rp	389.387.350,00
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (APBD)	Rp	4.900.378.750,00
3.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah			
4.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (APBD)	Rp	1.699.832.500,00
5.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya			
6.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana			
7.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan			
8.	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (APBD)	Rp	217.181.000,00
9.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp	20.555.410.672,00
10.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran	
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan			
	Jumlah Anggaran		Rp	27.762.190.272,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Sekretariat Daerah, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian jabatan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Subkegiatan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Rp 701.830.200,00.
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Rp 908.824.000,00 dan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Rp 194.516.000,00.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	PEMBANGUNAN DAERAH DIY,
HAMENGKU BUWONO X	Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.
	NIP. 19650512 198602 1 002

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2021

R

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman
Telp.: (0274) 562009 Fax.: (0274) 512567 e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id
website:http://inspektorat.jogjaprov.go.id/ Kode Pos 55286

Yogyakarta, 21 - 03 - 2022

Nomor : 700/01186
Lampiran : -
Sifat : Rahasia
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di _
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat DIY melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
   a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
      1) Perencanaan Strategis, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
      2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

b. Aspek ...

b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
   1) Pemenuhan Pengukuran;
   2) Kualitas Pengukuran;
   3) Implementasi Pengukuran.
c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
   1) Pemenuhan Pelaporan;
   2) Penyajian Informasi Kinerja;
   3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
d. Evaluasi Internal meliputi:
   1) Pemenuhan Evaluasi;
   2) Kualitas Evaluasi;
   3) Pemanfaatan Evaluasi.
e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
   1) Kinerja Yang di Laporkan *(Output)*;
   2) Kinerja Yang di Laporkan *(Outcome)*;
   3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
   4) Kinerja dari Penilaian *Stakeholder*.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai sebesar 90,95 kategori AA dengan interpretasi Sangat Memuaskan.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY dengan rincian sebagai berikut:
   a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 29,11 atau 97,05% dari bobot sebesar 30%;
   b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,99 atau 95,97% dari bobot sebesar 25%;
   c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,73 atau 91,56% dari bobot sebesar 15%;
   d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 9,63 atau 96,25% dari bobot sebesar 10%;
   e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 14,48 atau 72,40% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut yaitu dengan surat kesanggupan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah baik serta

melakukan ...

melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY beserta seluruh jajarannya agar:
   a. Secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja OPD meliputi Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal sehingga capaian nilai akuntabilitas kinerja yang telah diperoleh dapat dipertahankan/ditingkatkan;
   b. Meningkatkan peran sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka menunjang pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

SUMADI, S.H., M.H.
NIP. 196308 26 198903 1 007

Tembusan:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2021

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 589583 Faxsimile (0274) 586712
Website:www.bapeda.jogjaprov.go.id e-mail : bappeda@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 4 April 2022

Nomor : 700 / 03016
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Bappeda DIY

Kepada
Yth. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Menanggapi surat dari Inspektur DIY Nomor : 700 / 01186 tanggal 21 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kami akan berupaya melaksanakan rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2021 :

1. Secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja OPD meliputi Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal sehingga capaian nilai akuntabilitas kinerja yang telah diperoleh dapat dipertahankan/ditingkatkan.
2. Meningkatkan peran sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka menunjang pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAPPEDA

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.
NIP.19650512 198602 1 002

Lampiran 5. Penghargaan

1. Piala dan Piagam Pengahargaan Bumandala Rajata sebagai Simpul Jaringan Informasi Geospasial Terbaik Kategori Provinsi

2. Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah 2022 : Provinsi DIY sebagai 10 besar daerah dengan kategori Perencanaan dan Pencapaian Daerah tingkat Provinsi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Piagam
Penghargaan Pembangunan Daerah 2022

Nomor : KEP. 54 /M.PPN/HK/04/2022
Diberikan kepada :

Provinsi D.I Yogyakarta

sebagai 10 besar daerah dengan kategori **Perencanaan dan Pencapaian** Daerah tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2022

Jakarta, 22 April 2022
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Suharso Monoarfa

3. Piagam Penghargaan kepada DIY atas Penyelenggaraan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada:

Daerah Istimewa Yogyakarta

ATAS PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA
8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2021

Jakarta, 6 Juli 2022
a.n Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd

4. Sertifikat Apresiasi dari BAPPENAS kepada DIY sebagai penerima Apresiasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dalam Scaling Up Nutrition (SUN) Annual Meeting Tahun 2022

SERTIFIKAT APRESIASI

Apresiasi diberikan kepada:

Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai penerima

Apresiasi Penyusunan
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)

dalam *Scaling Up Nutrition* (SUN) *Annual Meeting* Tahun 2022
Jakarta, 23 November 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

Suharso Monoarfa

PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA